

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada umumnya terdapat tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintah daerah yaitu ketidakefektifan, inefisiensi dan *private inurement* (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak adanya mekanisme dasar mengenai pertanggungjawaban yang baku seperti pada organisasi bisnis. Organisasi pemerintahan juga tidak mengenal kepemilikan (*self interest*) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan (Primadana dkk., 2014).

Isu menarik mengenai kinerja pemerintah daerah menjadi sorotan bagi publik sebab belum menunjukkan adanya hasil yang lebih baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tentunya akan menuntut pemerintahan yang mempunyai kinerja yang lebih baik dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai salah satu perwujudan konsep otonomi daerah. Kinerja sendiri merupakan suatu kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja (Mahsun, 2006). Pemerintah dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah dapat mengelola pemerintahannya dengan baik. Sehingga pemerintahan tersebut dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Kinerja instansi pemerintah sangat erat kaitannya dengan pengawasan, akuntabilitas transparansi. Dalam meyakinkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan adanya suatu manajemen kinerja yang baik dalam suatu

pemerintahan. Berbagai aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan erat kaitannya dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna dkk., 2015).

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk dilakukan pada suatu lembaga pemerintahan. Pengawasan tersebut penting untuk dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Selain itu, pengawasan juga menjamin adanya kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002).

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah masing-masing secara transparan dan akuntabel untuk memberikan pelayanan publik kepada seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini pelayanan publik memegang peranan penting guna mewujudkan tujuan Negara untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya. Sehingga demi tercapainya tujuan tersebut, maka perlu adanya perubahan yang positif di setiap satuan kerja perangkat daerah yang ada di pemerintahan terkait dalam mengelola sistem pemerintahannya.

Penelitian ini lebih ditujukan pada faktor internal dari pada faktor eksternal, karena faktor internal yang cenderung lebih mudah untuk dikendalikan. Dalam kaitannya dengan permasalahan internal, SKPD di pemeritahan daerah banyak mengalami kesulitan baik dalam hal kualitas sumber daya itu sendiri, teknologi informasi yang digunakan serta sistem tata kelola pemerintahan yang kurang efektif. Seringkali terjadi beberapa perilaku yang menyimpang dari prosedur seperti prosedur pekerjaan yang tidak terstruktur, penggelapan dana, kurangnya sistem kompetitif di pemerintahan daerah, serta kurangnya produktifitas pegawai negeri sipil dalam memberikan kontribusi bagi pemerintah (Suprianto, 2014).

Mengingat pentingnya kinerja pegawai terhadap suatu tujuan dan keberlangsungan suatu organisasi maka dalam pemerintahan daerah tersebut harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai (Fransiska, 2015). Sehingga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain kompetensi kerja, peran audit internal, dan pemberdayaan psikologis (*meaning, self determination, dan impact*).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Banyaknya keunggulan yang dimiliki organisasi, tidak akan dapat memaksimalkan produktivitas tanpa adanya pegawai yang berkeahlian, kompeten, berdedikasi tinggi terhadap organisasi

serta memiliki kinerja yang optimal. Sehingga, hubungan antara kompetensi kerja dengan kinerja pegawai menunjukkan hubungan yang cukup kuat.

Peran audit internal dalam pemerintahan daerah tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Martiningsih dkk., 2015). Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh Sari dan Raharja (2011) namun menguji pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme *Good Corporate Governance*, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG.

Pemberdayaan psikologis merupakan suatu konsep psikologis dan memiliki beberapa dimensi. Terdapat 4 dimensi utama yang membentuknya yaitu *meaning*, *perceived impact*, *competence*, dan *self-determination*. Keempat dimensi di atas tergabung membentuk keseluruhan konstruk pemberdayaan psikologis, atau dengan kata lain, apabila salah satu dimensi tidak ada, maka tingkat pemberdayaan yang diperoleh juga tidak maksimal (Rahmasari, 2011). Menurut Spreitzer (2005), *meaning*, *perceived impact*, *competence*, dan *self-determination* merupakan keempat dimensi utama yang membentuk pemberdayaan psikologis.

Dalam rangka pendayagunaan pemerintahan daerah, setelah melakukan penataan fungsi-fungsi pemerintahan, restrukturisasi pemerintahan daerah, serta melakukan sistem *monitoring* dan evaluasi kinerjanya, maka selanjutnya untuk mengembangkan *good government governance* langkah

yang akan ditempuh kedepan melalui pengenalan akuntabilitas kinerja melalui sosialisasi, dan secara bertahap dilakukan penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Aziz, 2014).

Penyelenggaraan *Good Government Governance* pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sampai saat ini dianggap masih sangat rendah (Aziz, 2014). Dengan kondisi seperti ini, maka hal utama yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima dengan kompetensi kerja yang diberikan kepada masyarakat, dan peran dari audit internal yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat guna untuk menciptakan *good government governance*.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang salah satunya dilakukan oleh Simangunsong (2014) tentang *The Impact of Internal Control Effectiveness and Internal Audit Role toward the Performance of Local Government*. Berdasarkan latar belakang dan pengungkapan alasan-alasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan mengganti menambahkan beberapa variabel independen yaitu kompetensi kerja yang dikutip dari penelitian Fransiska (2015) dan pemberdayaan yang terdiri dari *meaning, self determination, dan impact* yang mengacu pada penelitian Suprianto (2014). Pada penelitian Simangunsong (2014) hanya akan mengambil satu variabel independen yaitu peran audit

internal, karena satu variabel lainnya sudah banyak diteliti, dan hasilnya berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Kontribusi dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap permasalahan yang ada dalam pemerintahan daerah, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Secara otomatis jika pemerintahannya lebih baik, maka persepsi atau pemikiran masyarakat akan berubah menjadi positif terhadap pemerintahan daerah. Sehingga dapat pula menimbulkan sinergi yang positif yang mana akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Aziz, 2014).

Penelitian ini penting untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan berupaya untuk mewujudkan *good government governance* dengan menggunakan pola pengelolaan kinerja pemerintah daerah. Sehingga diharapkan akan memberikan manfaat bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjanya. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kompetensi Kerja, Peran Audit Internal, dan Pemberdayaan Psikologis (*Meaning, Self Determination, dan Impact*) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui *Good Government Governance* sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - DI Yogyakarta)”.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini merupakan kompilasi dari tiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simangunsong (2014), Fransiska (2015), dan Suprianto (2014). Selain itu,

perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi kerja, peran audit internal, dan pemberdayaan yang terdiri dari *meaning*, *self determination*, dan *impact* yang akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah peran audit internal berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah *meaning* berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
4. Apakah *self determination* berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
5. Apakah *impact* berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
6. Apakah *Good Government Governance* memperkuat hubungan positif antara kompetensi kerja dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah?
7. Apakah *Good Government Governance* memperkuat hubungan positif antara peran audit internal dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah?

8. Apakah *Good Government Governance* memperkuat hubungan positif antara *meaning* dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah?
9. Apakah *Good Government Governance* memperkuat hubungan positif antara *self determination* dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah?
10. Apakah *Good Government Governance* memperkuat hubungan positif antara *impact* dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran audit internal terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *meaning* terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *self-determination* terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh *impact* terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
6. Untuk mengetahui *Good Government Governance* memperkuat hubungan antara kompetensi kerja dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah.
7. Untuk mengetahui *Good Government Governance* memperkuat hubungan antara peran audit internal dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah.



8. Untuk mengetahui *Good Government Governance* memperkuat hubungan antara *meaning* dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah.
9. Untuk mengetahui *Good Government Governance* memperkuat hubungan antara *self determination* dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah.
10. Untuk mengetahui *Good Government Governance* memperkuat hubungan antara *impact* dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi utama dari studi ini adalah untuk memberikan pengetahuan tambahan mengenai tingkat kinerja satuan kerja perangkat daerah dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para peneliti tentang pengaruh kompetensi kerja, peran audit internal, dan pemberdayaan (*meaning, self-determination, dan impact*) terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan *good government governance*.